



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI LAMPUNG**

*

**

**

*

JAKARTA 2022



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI LAMPUNG
12-16 JULI 2022**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Lampung adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 28 Maret 2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 18 Mei 2022.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Lampung adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Lampung adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Lampung;
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Lampung; serta
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

D. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Lampung dipimpin oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 12-16 Juli 2022 dan bertempat di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kota Bandar Lampung.

F. GAMBARAN UMUM

Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatra, dengan ibu kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki dua kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro serta 13 kabupaten. Posisi Lampung secara geografis berada di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sumatra Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda.

Provinsi Lampung memiliki pelabuhan utama bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni, bandar udara utama yakni Radin Inten II terletak 28 km dari ibu kota provinsi, serta Stasiun Tanjungkarang di pusat ibukota. Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini berada di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sumatra Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda.

Wilayah Provinsi Lampung memiliki beberapa pulau, diantaranya Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Kelagian, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Pulau Krakatau, Pulau Putus, Pulau Tabuan, Pulau Tampang dan Pulau Pisang. Geografi alam Provinsi Lampung, tengah-tengahnya merupakan dataran rendah. Kemudian sebelah barat dan selatannya khususnya di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit dimana sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan Pulau Sumatra. Sedangkan di dekat pantai sebelah timur dan di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara merupakan perairan laut.



Dengan luas ± 3.528.835 ha, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, prospektif, dan dapat diandalkan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan,

pariwisata, sampai kehutanan. Provinsi ini memiliki lahan sawah irigasi teknis seluas 103.245 ha, sawah, irigasi setengah teknis 24.164 ha, dan lahan sawah irigasi non teknis seluas 244.008 ha. Total saluran irigasi mencapai 371.417 km.

Sawah-sawah inilah yang pada 2006 menghasilkan 2.129.914 ton padi (gabah keringgiling/GKG), terdiri atas 1.959.426 ton padi sawah dan 170.488 ton padi ladang. Dibanding dua tahun terakhir, produktivitas padi yang dicapai meningkat. Pada 2004, produksi padi mencapai 2.091.996 ton sementara pada 2005 mencapai 2.124.144 ton. Semua itu belum termasuk produksi ubi kayu rotan 2006 mencapai lebih dari 5.473.283 ton dan produksi jagung 1.183.982 ton. Dengan demikian ketahanan pangan di provinsi ini cukup kuat.

Kawasan hutan mencapai 1.004.735 ha atau sekitar 30,43 % dari luas wilayah provinsi, terdiri atas hutan lindung 317.615 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata/taman nasional 462.030 ha; hutan produksi terbatas 33.358 ha dan hutan produksi tetap 91.732 ha. Dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, produksi kehutanan kini lebih diarahkan kepada hasil hutan non kayu dan potensi ekowisatanya.

Hasil hutan pada 2006 berupa kayu bulat sebanyak 3.4121.171 m³, kayu gergajian 145.732,25 m³ dan kayu lapis 82.714.45 m³, Sedangkan produksi basil hutan non kayu berupa damar mata kucing sebanyak 5.454,17 ribu ton, damar batu 1.351,30 ton, arang 30.347 rotan manau 3.000 batang, dan rotan lilin 1.293,24 ton.

Provinsi Lampung memiliki wilayah pesisir yang luas dengan garis pantai lebih kurang 1.105 km dan 69 pulau-pulau kecil dengan beragam jenis habitat yang berbeda, termasuk lingkungan yang dibuat manusia, seperti tambak udang dan perkotaan. Kemudian untuk luas wilayah pesisirnya sekitar 440.010 ha dan luas perairan laut dalam batas 12 mil adalah 24.820,0 km² yang merupakan bagian wilayah Samudera Hindia (pantai barat Lampung), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka), dan Laut Jawa (pantai timur Lampung). Dengan wilayah pesisir dan laut yang cukup luas di Provinsi Lampung, maka sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI mendorong Provinsi Lampung perlu mengoptimalkan potensi yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyatnya karena memiliki sumber daya alam yang luar biasa di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. KUNJUNGAN DAN DISKUSI DI LOKASI PERCONTOHAN “RICE ESTATE” LAHAN KERING (PADI GOGO) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pada kegiatan ini, Tim Komisi IV DPR melakukan peninjauan langsung dan mendapatkan penjelasan terkait kegiatan pengembangan Padi Gogo yang dilakukan PT Huma Indah Mekar (HIM) yang merupakan anak perusahaan dari PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP). Secara umum, Tim Komisi IV DPR RI mengapresiasi dan mendukung inovasi yang dilakukan oleh PT HIM dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hingga saat ini, budi daya Padi Gogo tahap I di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki areal luas tanam sebesar 84 ha. Masing-masing varietas yang ditanam untuk budi daya Padi Gogo adalah varietas Inpago Unsoed I, Situ Patenggang, Inpago Unsoed Protani, IPB 9G, dan Inpago 10.

Lebih lanjut, Komisi IV DPR RI menilai langkah yang dilakukan oleh PT HIM ini diharapkan dapat direplikasi atau dilakukan di daerah lain. Artinya, hal ini tidak bisa diabaikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah harus hadir memberikan perhatian. Untuk itu pemerintah, baik pusat maupun daerah beserta pihak swasta harus saling bersinergi agar inovasi riset budi daya pertanian, dalam hal ini Padi Gogo di Kabupaten Tulang Bawang Barat tetap berlanjut. Apalagi, saat ini sektor pertanian menghadapi tantangan diantaranya kenaikan harga pangan akibat situasi geopolitik, produksi dalam negeri yang cenderung menurun, perubahan iklim, dan merebaknya penyakit hewan dan tumbuhan. Sehingga, seluruh pihak terkait harus mampu melakukan antisipasi untuk mengatasi hal-hal tersebut.

Menanggapi langkah yang dilakukan oleh PT HIM, Komisi IV DPR RI menyampaikan bahwa terobosan yang dibutuhkan regulasi mendukung inovasi, serta regulasi yang menguntungkan petani. Pada kesempatan yang sama, dipertanyakan berapa biaya yang dilakukan untuk mengonversi lahan perkebunan menjadi lahan pertanian, serta jumlah airnya. Hal ini penting dan harus terukur, apabila pelaku usaha-pelaku usaha di daerah lain didorong untuk melakukan inovasi yang sama. Tim Komisi IV DPR juga menyampaikan

agar tanaman pangan yang dikembangkan tidak terbatas pada tanaman padi saja, namun varietas lain yang memiliki nilai keekonomian tinggi dan dibutuhkan oleh masyarakat, seperti kedelai, dan kacang-tanah.

B. PERTEMUAN DAN DISKUSI BERSAMA BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG SERTA PETANI DAN PEMBUDI DAYA IKAN DI GEDUNG SERBA GUNA MENGGALA

Pada pertemuan ini disampaikan oleh Bupati Tulang Bawang, bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang selalu mendukung kebijakan Pemerintah Pusat untuk menyejahterakan masyarakat. Diharapkan di masa depan sinergitas dengan Pemerintah Pusat yang didukung oleh DPR RI dapat menghasilkan terobosan-terobosan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pada pertemuan ini, Tim Komisi IV DPR RI menerima masukan dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, yaitu:

Bidang Pertanian

Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu daerah yang terdampak PMK, untuk itu dibutuhkan vaksin, obat-obatan, dan desinfektan. Selain itu, juga disampaikan bahwa Kabupaten Tulang Bawang sangat kekurangan tenaga dokter hewan. Untuk itu meminta untuk ditambahkan formasi tenaga kesehatan hewan (nakeswan). Hal lainnya adalah, adanya aspirasi untuk bantuan ternak sapi, Jalan Usaha Tani dan gorong-gorong sepanjang 10 km, P2L, sarana penjemuran dan open untuk tiwul, serta keluhan terkait ketersediaan pupuk yang dibutuhkan pada musim tanam, diantaranya pupuk phonska.

Menanggapi hal tersebut, Tim Komisi IV DPR RI menyampaikan terkait kebijakan Pemerintah mengenai simplifikasi pupuk subsidi menjadi 2 (dua) jenis, berdasarkan rekomendasi dari Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dibuka kios pupuk nonsubsidi untuk memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani. Terkait aspirasi-aspirasi yang disampaikan, akan dipenuhi oleh Pemerintah, baik melalui kegiatan regular maupun aspirasi dari anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan Lampung, baik pada tahun 2022 maupun 2023 nanti. Selanjutnya, tim Komisi IV DPR RI meminta agar bantuan yang diberikan harus dimanfaatkan, jangan sampai

terbengkalai. Selain itu, bantuan yang ada harus tersebar jangan terpusat di satu desa saja.

Bidang Perikanan

Adapun terkait dengan perikanan di Tulang Bawang diketahui mempunyai potensi yang cukup besar dimana pernah menjadi sentra budi daya udang terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di Asia. Untuk itu dengan potensi perairan laut, sungai, dan rawa yang dimiliki maka perlu ada pembenahan revitalisasi pengembangan berbagai komoditas perikanan unggulan, berupa ikan, udang, kepiting, rajungan kerang, dan komoditas lainnya berbasis kesehatan lingkungan perairan agar sektor perikanan tumbuh kembali menjadi sektor andalan guna meningkat taraf hidup ekonomi pembudi daya ikan. Terlebih Kabupaten Tulang Bawang memiliki potensi tambak udang Bumi Dipasena, sehingga Pemerintah telah membantu memfasilitasi bantuan berupa kapal sedot lumpur (*dredger*) yang nilainya cukup mahal sebagai upaya merevitalisasi lahan untuk mendorong produktivitas perikanan. Namun setelah menjalankan kegiatan tersebut, masyarakat merasa biaya operasional terlalu tinggi sehingga Komisi IV DPR RI memberikan arahan berupa pilihan kepada penerima manfaat bantuan kapal keruk tersebut, yakni perlu dibentuk “single manajemen” sistem pengelolaannya pada Dipasena. Jika upaya tersebut tidak bisa dijalankan maka alternatif lain kapal keruk (*dredger*) akan diambil kembali oleh pemerintah pusat dampak dari tidak dimanfaatkan dengan baik.

Lebih lanjut, masih terdapatnya masalah abrasi yang dapat menurunkan ekosistem sumber daya dan adanya sedimentasi di daerah pesisir sehingga diperlukan alat bantu berupa excavator yang “*long arm*” untuk mengatasi adanya sedimentasi tersebut. Selain itu, masyarakat meminta adanya kegiatan bimbingan teknis atau kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi pembudi daya ikan agar dapat mengembangkan usaha di sektor perikanan, mengingat terdapat kurang lebih 2.646 petambak dimana 80%-nya tidak memiliki modal yang cukup.

Dari berbagai uraian diatas, Komisi IV DPR RI meminta kepada pembudi daya ikan agar khususnya di wilayah Dipasena untuk menjaga tambak ikan dari pencemaran lingkungan, pencegahan tebang mangrove, menanam bakau secara swadaya, serta mengakses bantuan pinjaman pembiayaan modal dari

Badan Layanan Umum LPMUKP-KKP dengan bertanggung jawab, artinya setelah dapat pinjaman maka masyarakat wajib mengembalikan pinjaman modal secara baik dan tepat waktu agar proses percepatan revitalisasi lahan dapat segera direalisasikan.

Bidang Kehutanan

Permasalahan sedimentasi di tambak dikarenakan banyaknya pohon-pohon mangrove yang ditebangi. Oleh karena itu perlu dilakukan penanaman ulang bibit-bibit pohon mangrove di sekitar perairan dan muara untuk mengurangi sedimentasi. Komisi IV DPR RI akan meminta BPDAS Way Seputih Way Sekampung untuk membantu menyediakan bibit-bibit pohon mangrove.

C. PERTEMUAN DAN DISKUSI DI BPTP LAMPUNG

Tim Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan dan diskusi terkait hasil/inovasi yang dihasilkan oleh BPTP Lampung, diantaranya inovasi benih Lada Perdu Petaling, benih Kopi Lampung, hingga benih Alpukat. Menanggapi hal tersebut, tim Komisi IV DPR RI menegaskan harus ada *political will* dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk melindungi keberlangsungan inovasi riset sektor pertanian di Indonesia. Terutama dalam mendukung upaya peningkatan produksi pertanian/pangan.

Tim Komisi IV DPR RI mendukung serta mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk memberikan tambahan alokasi anggaran BPTP. Selain itu, menyoroti perlunya tenaga profesional/peneliti untuk diberikan kesejahteraan yang layak dan ruang untuk berkarya (diantaranya melakukan kajian dan inovasi). Beberapa hal yang menjadi topik pembahasan diantaranya adalah, terkait pelepasan varietas alpukat pringsewu GS serta varietas siger puan yang masih harus menunggu sertifikat dari Kabupaten Lampung Timur. Komisi IV DPR RI mendorong varietas alpukat siger puan dapat didistribusikan melalui program-program penghijauan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bibit Produktif, bahkan dibuatkan program Kebun Bibit Rakyat.

Hal lainnya terkait Kabupaten Lampung Utara mengenai potensi pengembangan agrowisata Lampung Utara, untuk itu dibutuhkan setidaknya

7000 batang pohon lada dan perlunya dukungan/bantuan untuk memperbanyak bibit lada perdu. Kepada seluruh unit kerja Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus melakukan inovasi-inovasi untuk pengembangan pertanian.

Khusus kepada Balai Veteriner Lampung agar inisiatif melakukan surveilans terhadap penyakit hewan, jangan hanya menunggu laporan, apalagi pemerintah daerah menghadapi kendala kekurangan tenaga kesehatan, dimana jumlah yang ada tidak sebanding dengan populasi.

D. PERTEMUAN DAN DISKUSI MENGENAI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DAN PENYERAHAN VAKSIN PMK DI KANTOR GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG

Lampung merupakan daerah penghasil utama komoditas pangan, hortikultura serta perkebunan seperti: Komoditas Ubi Kayu (Peringkat ke-1 Nasional), Padi (Peringkat ke-6 Nasional), Jagung, Pisang, Nanas, Tebu, Kopi, Lada, Kakao, Karet, dan sebagainya. Dari 33 agenda kerja Gubernur Lampung untuk mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya, terdapat tujuh agenda kerja untuk sektor pertanian yakni kartu petani berjaya, beasiswa mahasiswa pertanian, mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu, revitalisasi lada, meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya, nelayan Berjaya, dan Lampung sebagai pusat inkubasi tanaman nusantara. Dalam pertemuan ini juga disampaikan mengenai capaian pertumbuhan ekonomi Lampung masa triwulan I tahun 2022 yang tumbuh sebesar 2,96 persen, dibandingkan masa triwulan I tahun 2021.

Berdasarkan informasi BPS Tahun 2022, sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan di Lampung tumbuh pada Triwulan I 2022 sebesar 15,10 persen. Selain itu disampaikan bahwa terjadi penurunan angka stunting tahun 2021 yang sangat yaitu turun 26,26% dibanding tahun 2019 (berdasar data SSGI).

Disampaikan oleh Tim Komisi IV DPR RI bahwa salah satu tujuan melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung adalah dalam rangka berdialog dan berdiskusi bersama terkait Kawasan konservasi, permasalahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pada pertemuan ini juga dilakukan penyerahan bantuan vaksin PMK tahap II secara simbolis kepada Pemerintah Provinsi

Lampung sebanyak 50.000 dosis. Adapun beberapa hal yang menjadi masukan dan aspirasi pada pertemuan ini, adalah:

Bidang Pertanian

Meminta Pemerintah Provinsi Lampung untuk berkordinasi dengan Kementerian Pertanian dan pihak terkait lainnya untuk memberikan dukungan dalam mengembangkan sektor pertanian di Provinsi Lampung, antara lain dengan BPTP Lampung diantaranya terkait penyediaan bibit lada perdu dan kopi serta beras unggul/bernutrisi untuk mencegah stunting, Badan Karantina dalam kaitan pencegahan hama dan penyakit hewan serta tumbuhan, Ditjen Hortikultura terkait penyediaan bibit pisang, BPDPKS berupa dukungan keuangan untuk pekebun sawit rakyat, dan Perum Bulog terkait penyediaan beras.

Dalam pertemuan ini juga disinggung mengenai permasalahan pada ternak unggas dimana terjadi *cutting*/pemusnahan DOC, yang salah satu upaya antisipasinya adalah telur DOC bisa dibagikan untuk mengatasi stunting. Secara umum tim Komisi IV DPR RI mendorong Provinsi Lampung untuk mengembangkan potensinya dan menjadi lumbung pangan nasional serta mendukung pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Selain itu menggarisbawahi mengenai peringatan dari FAO dan PBB akan ancaman krisis pangan, yang tidak saja akan berdampak pada krisis politik dan ekonomi, namun juga krisis kepercayaan.

Tidak hanya itu, pertemuan ini juga membahas terkait defisit pupuk, untuk itu perlu adanya komitmen Pemerintah akan sertifikasi pupuk organik yang diproduksi oleh masyarakat serta penting dan strategisnya peran karantina dalam mengantisipasi dan mengatasi wabah dan penyakit. Wabah PMK dinilai tidak perlu terjadi jika karantina bekerja sesuai tupoksinya secara optimal dan menyeluruh. Beberapa ternak sapi yang dimusnahkan harus segera diganti.

Bidang Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membuat rencana membangun balai perikanan budi daya ikan air tawar yang berlokasi di Kabupaten Mesuji sebagaimana usulan dari Pemerintah Daerah dan atas

persetujuan Komisi IV DPR RI. Rencana pembangunan balai perikanan budi daya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi ikan air tawar dalam rangka pemenuhan stok benih ikan endemik Lampung, seperti jelabat, baung, dan belida. Permasalahan yang disampaikan saat pertemuan antara Komisi IV DPR RI dengan Gubernur, Muspida, dan masyarakat yakni diperlukan fasilitas “embung” dalam rangka menopang kebutuhan air untuk kebutuhan budidaya ikan air tawar masyarakat. Selan itu, membahas tindaklanjut adanya temuan kejaksaaan mengenai keramba jaring apung (KJA) *offshore* yang mangkrak di beberapa daerah di Indonesia. Komisi IV DPR RI mendukung KJA *offshore* dipindahkan ke Provinsi Lampung tepatnya di Selat Semangka yang memiliki perairan dan ekosistem yang cukup kondusif dan baik agar dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Produktivitas pertanian di Provinsi Lampung yang tinggi salah satunya karena terjaganya hutan yang ada di Provinsi Lampung. Gubernur Provinsi Lampung berkomitmen menjaga kawasan hutan yang ada, yaitu 28 % dari luas Provinsi Lampung sebesar 3,5 juta hektar atau 35.000 Km². Oleh karena itu Provinsi Lampung meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran untuk menjaga dan memelihara kawasan hutan dapat di tambah. Kegiatan penjagaan dan pemeliharaan kawasan hutan oleh pemerintah daerah agar dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan pada tahun 2023.

Taman Nasional di Lampung ada 2, yaitu Taman Nasional Way Kambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sehubungan dengan rencana TN Way Kambas sebagai pusat badak nasional, Gubernur Lampung meminta agar penangkaran Badak Sumatera tetap diliarikan di alam dan tidak ada relokasi Badak Sumatera yang ada di TN Bukit Barisan Selatan ke TN Way Kambas karena bukan habitatnya. Permasalahan lain yang disampaikan adalah tentang keanekaragaman hayati yang ada di taman nasional seperti beruang madu perlu dijaga sehingga memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada PT Bakrie Sumatera Plantation atas inovasi yang dilakukan dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan mengurangi impor. Selanjutnya meminta Pemerintah untuk memberikan dukungan kepada perusahaan yang akan melakukan konversi lahannya menjadi lahan pangan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk mendukung pengembangan varietas yang adaptif di lahan kering seperti kedelai dan kacang tanah. Selanjutnya meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan pendampingan dan masukan berkaitan dengan aspek budi daya dan kesesuaian agroekosistem spesifik di lapangan. Sehingga akan didapat potensi hasil maksimal dari setiap pertanamannya.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian sebagai induk dari BPTP untuk memanfaatkan hasil riset dan inovasi yang dilakukan secara optimal, mengingat BPTP merupakan lembaga pengkajian teknologi pertanian di daerah yang memiliki peran strategis dalam menyebarkan inovasi dan teknologi di sektor pertanian, salah satunya dalam hal penyediaan benih berkualitas. Hal ini sejalan dengan keputusan rapat dimana Komisi IV DPR RI telah meminta seluruh Direktorat Jenderal Teknis untuk memanfaatkan aset dan sumber daya yang ada pada BPTP dalam produksi dan perbanyak benih unggul. Sehingga, hasil produk-produk BPTP baik berupa benih dan inovasi teknologi serta sumberdaya spesifik lokasi dapat disebarluaskan kepada petani, kelompok tani, dan masyarakat.
4. Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian dan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam sektor pertanian, dan memberikan dukungan kepada Provinsi Lampung sebagai penyangga pangan Nasional. Bukan hanya dari sisi pertanian, tetapi juga perkebunan, peternakan, perikanan, juga termasuk kehutanan. Selanjutnya meminta Pemerintah cq Kementerian Pertanian dan juga Pemerintah Daerah untuk menyusun target produksi dan penurunan stunting.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah cepat dalam rangka merevitalisasi lahan tambak ikan di Dipasena Kab. Tulang Bawang, serta memberikan bantuan modal usaha dan bantuan sarana prasarana seperti excavator untuk mengatasi sedimentasi perairan.

6. Komisi IV DPR RI mendorong masyarakat melalui koperasi untuk membuat sistem single manajemen untuk mengoperasikan kapal keruk agar optimal dan melakukan upaya menanam mangrove secara swadaya untuk mengatasi abrasi.
7. Komisi IV DPR RI mendukung dibangunnya balai perikanan budi daya di Kab. Mesuji guna meningkatkan produksi ikan air tawar dalam rangka pemenuhan stok benih ikan endemik Lampung, seperti jelabat, baung, dan belida yang dianggap hampir punah.
8. Komisi IV DPR RI mendukung KJA *offshore* dipindahkan ke Provinsi Lampung tepatnya di Selat Semangka yang memiliki perairan dan ekosistemnya yang cukup kondusif dan baik agar dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
9. Komisi IV DPR RI mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta rehabilitasi mangrove di Provinsi Lampung sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan mencegah bencana dan kerusakan lingkungan. Kegiatan RHL dan rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melibatkan masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga lain.
10. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun 2023 untuk kegiatan pengamanan hutan lindung dan kegiatan lainnya untuk menjaga kelestarian dan keutuhan kawasan hutan.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Lampung. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 18 Juli 2022

Ketua Tim,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151

DOKUMENTASI



BERITA

1. <https://nasional.tempo.co/read/1612013/komisi-iv-apresiasi-inovasi-riset-budi-daya-padi-gogo>.
2. <https://netizenku.com/sekda-tubaba-dampingi-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri/>
3. <https://daerah.sindonews.com/read/824575/97/bupati-winarti-antusias-sambut-kunjungan-ketua-komisi-iv-dpr-ri-sudin-1657620430>
4. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6175965/bupati-tulang-bawang-harap-komisi-iv-dpr-serap-aspirasi-warganya>
5. <https://lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-arinal-djunaidi-menerima-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-sampaikan-berbagai-capaian-pembangunan-di-provinsi-lampung>
6. <https://lampungpro.co/post/40988/gubernur-terima-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-paparkan-pertumbuhan-ekonomi-lampung>
7. <https://beritaanda.net/komisi-iv-dpr-ri-lakukan-kunjungan-kerja-di-provinsi-lampung/>